

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persetujuan Promotor dan Co-Promotor</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK/ABSTARCT</b> .....	<b>vi</b>
<b>Ringkasan Disertasi/ Summary</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>1</b>
<b>Glosarry</b> .....	<b>xxx</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xxxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah ..	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual Disertasi .....	13
F. Kerangka Teori .....	60
G. Kerangka pemikiran Disertasi .....	82
H. Metode Penelitian.....	83
1. Jenis Penelitian .....	83
2. Sifat Penelitian.....	83
3. Metode Pendekatan .....	84
4. Data dan Sumber Data .....	86
5. Teknik Pengumpulan Data .....	87
6. Analisa Data .....	88
I. Orisionalitas .....	89
J. SistematikaPenulisan .....	91

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Jaminan Fidusia .....	94
1. Sejarah Jaminan Fidusia .....	94
2. Prinsip Jaminan Fidusia.....	98
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	100
B. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	101
1. Pengertian konsumen.....	101
2. Perlindungan Konsumen.....	105
3. Azas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	110
C. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Baku .....	112
1. Pengertian Klausula Baku.....	112
2. Jenis-jenis Perjanjian menggunakan Klausula Baku .....	118
3. Landasan Hukum Perjanjian yang menggunakan klausula baku .....	123

## **BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN PERKREDITAN**

A. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	128
1. Pengertian Eksekusi .....	128
2. Macam-macam Eksekusi .....	132
3. Eksekusi jaminan Fidusia .....	134
4. Ketentuan Pidana dalam undang-undang Jaminan Fidusia .....	140
B. Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Jaminan Fidusia Terkait Dengan Hukum Perlindungan Konsumen .....	142

- C. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan .....

156

#### **BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL**

- A. Sengketa Dalam Perjanjian Fidusia.....  
.....165
- B. Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial.  
.....178
- C. Kendala Dala Eksekusi Jaminan Fidusia.....  
.....191
- D. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Fidusia Terkait Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial  
.....198
1. Upaya penyelesaian sengketa secara yuridis (Litigasi) .....  
.....198
2. Upaya penyelesaian sengketa secara non-yuridis (Non-Litigasi)  
.....203

#### **BAB V REKONSTRUKSI HUKUM JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HUKUM KONSUMEN TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL**

- A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Berbagai Negara .....  
.....208
1. Perbandingan dengan Negara Singapura .....  
.....208
2. Perbandingan dengan negara belanda.....  
.....214
- B. Rekonstruksi Hukum Jaminan Fidusia Terhadap Hukum Konsumen Terkait Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan

Eksekutorial .....	
.....	217

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	
.....	239
B. Implikasi Kajian Disertasi .....	
.....	241
C. Saran .....	
.....	243

## **DAFTAR PUSTAKA**

## GLOSARRY

### *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dengan Berbasis Nilai Keadilan*

- 1. Rekontruksi** : Kata rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan „konstruksi“ sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>1</sup> Rekonstruksi hukum pidana positif Indonesia meliputi rekonsuruksi substansi hukum (*legal substance report*), rekonstruksi sruktur hukum (*legal structure report*) dan rekonstruksi budaya hukum (*legal culture report*)<sup>2</sup>
- 2. Fidusia** : Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

---

<sup>1</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.469.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief (1), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2001 hal..4.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, tahun 2000, hal. 3

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>4</sup>

**3. Jaminan Fidusia :** Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.<sup>5</sup>

**4. Keadilan :** Asal kata dari “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>6</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

---

<sup>4</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, tahun 2002, hal 2.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Bandung, tahun 2001, hal.168

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 2001, hal. 517.